



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
LKjIP TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran ALLAH SWT atas Rahmat dan Karunia-Nya, kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024. LKjIP merupakan bentuk komitmen nyata dari Biro Kesejahteraan Rakyat dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 menyajikan upaya-upaya yang telah dilakukan untuk merealisasikan program yang telah ditetapkan dengan menjabarkan program tersebut dalam kegiatan-kegiatan. Dengan dukungan sumber daya, sarana prasarana yang ada, serta kebersamaan pimpinan dan staf yang harmonis, Alhamdulillah, tugas pokok dan fungsi yang diemban telah dapat dilaksanakan dengan lancar dan baik. Capaian kinerja ini secara transparan dan akuntabel dituangkan dalam sebuah laporan pertanggungjawaban sekaligus sebagai sumber informasi dalam rangka mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Kami menyadari masih ada kekurangan. Untuk itu segala sesuatu yang telah berjalan dengan baik akan dijaga dan ditingkatkan, sedangkan kekurangan yang ada menjadi tanggung jawab bersama untuk memperbaikinya. Demikian



LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Tanjungpinang, Januari 2025

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau



Pembina Utama Muda / IV.c



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I	5
PENDAHULUAN	5
A. Gambaran Umum Organisasi	5
B. Tugas dan Fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat	7
C. Permasalahan Utama	15
D. Sistematika Penulisan	15
BAB II	17
PERENCANAAN KINERJA	17
A. Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026	18
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	21
BAB III	24
AKUNTABILITAS KINERJA	24
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT TAHUN 2024	24
A. Capaian Kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Tahun 2024	24
B. Realisasi Kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat dan target pada Renstra 2021-2026	62
C. Realisasi Anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat Tahun 2024	64
BAB IV	72
PENUTUP	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

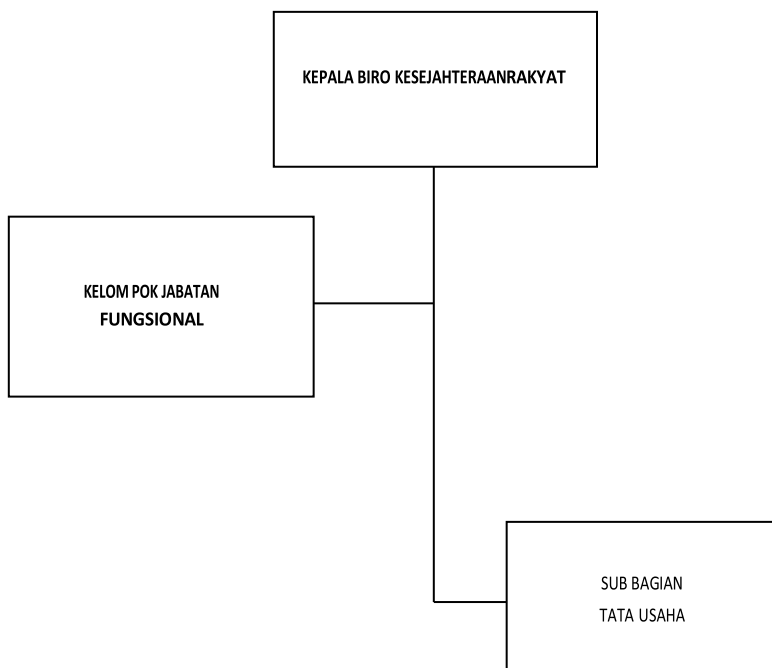
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) maka setiap instansi pemerintah dituntut untuk memiliki 3 (tiga) landasan utama yaitu: transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Akuntabilitas dalam hal ini merupakan perwujudan organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya sehingga menghasilkan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Sebagai bentuk akuntabilitas tersebut, maka Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tahun 2024, Biro Kesejahteraan Rakyat mengacu pada Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, dengan struktur organisasi sebagai berikut:



Struktur Organisasi Biro Kesejahteraan Rakyat Tahun 2024



Jumlah personalia di lingkungan Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2024 adalah sebanyak 74 (tujuh puluh empat) orang dengan rincian sebagai berikut:

1. Menurut Jabatan/Eselon dan staf

No	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1 Orang
2	Eselon IV	1 Orang
3	Pejabat Fungsional	7 Orang
4	Staf PNS	10 Orang
5	Staf PTT	7 Orang
6	Staf THL	48 Orang
TOTAL		74 Orang

2. Menurut jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	48 Orang
2	Perempuan	26 Orang
TOTAL		74 Orang

3. Menurut tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Strata III	1 Orang
2	Strata II	6 Orang
3	Strata I	33 Orang
4	Diploma I-III	5 Orang
5	SMA sederajat	21 Orang
6	SMP sederajat	2 Orang
7	SD sederajat	6 Orang
TOTAL		74 Orang

B. Tugas dan Fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat

Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar. Untuk menyelenggarakan tugas, Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

1. penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar;

2. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar;
3. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar;
4. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang tata usaha, sarana dan prasarana spiritual, kelembagaan bina spiritual;
5. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar I, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar II, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar III;
6. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesehatan, sosial dan pendidikan;
7. penyiapan data tentang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
8. penyiapan bahan perumusan kebijakan yang berhubungan dengan sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
9. penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;



10. penyiapan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
11. penyiapan bahan pertimbangan pemberian bantuan di bidang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan
12. penyiapan bahan, pengoordinasian dan melakukan perumusan kebijakan Daerah bidang lembaga bina spiritual dan kerukunan umat beragama;
13. penyiapan dan pengoordinasian bahan pedoman pembinaan lembaga bina spiritual dan kerukunan umat beragama;
14. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan pengembangan kerja sama antar lembaga bina spiritual dan kerukunan umat beragama;
15. penyiapan bahan pengolahan data, saran, pertimbangan serta koordinasi kegiatan dan penyusunan laporan program pembinaan umat beragama dan kerja sama antar lembaga bina spiritual dan kerukunan umat beragama;
16. pelaksanaan koordinasi lintas sektor dan pertemuan/rapat-rapat koordinasi di bidang kerukunan umat beragama dan serta kerja sama antar lembaga bina spiritual;
17. pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kerukunan umat beragama dan aliran serta kerja sama antar lembaga bina spiritual;
18. pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian kegiatan musyawarah antar umat beragama dan aliran kepercayaan;
19. penyiapan dan pengoordinasian kegiatan forum kerukunan umat beragama dan konsultasi kerukunan hidup antar umat beragama dan aliran kepercayaan;
20. pelaksanaan koordinasi kerja sama sosial kemasyarakatan dan konsultasi penanggulangan secara dini masalah dan kasus kerukunan hidup antar umat beragama dan aliran kepercayaan;
21. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerukunan umat beragama dan aliran kepercayaan;
22. penyiapan bahan, dan melakukan pemantauan dan evaluasi kebijakan Daerah bidang lembaga dan kerukunan keagamaan
23. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kepemudaan, olahraga,

- kebudayaan dan pariwisata;
24. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
 25. penyiapan bahan koordinasi pembinaan di bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
 26. penyiapan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
 27. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata
 28. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan Desa, transmigrasi dan tenaga kerja;
 29. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan Desa, transmigrasi dan tenaga kerja;
 30. penyiapan bahan koordinasi pembinaan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pemberdayaan masyarakat dan Desa, transmigrasi dan tenaga kerja;
 31. penyiapan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan Desa, transmigrasi dan tenaga kerja;
 32. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan Desa, transmigrasi dan tenaga kerja

33. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik, persandian dan perhubungan;
34. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik, persandian dan perhubungan;
35. penyiapan bahan koordinasi pembinaan di bidang komunikasi, informatika, statistik, persandian dan perhubungan;
36. penyiapan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang komunikasi, informatika, statistik, persandian dan perhubungan;
37. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik, persandian dan perhubungan
38. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang kesehatan;
39. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kesehatan;
40. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesehatan
41. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang sosial;
42. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang sosial;
43. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang sosial
44. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang pendidikan;
45. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pendidikan;
46. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pendidikan;
47. Penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk

- mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;
48. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya;
 49. Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
 50. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
 51. penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar;
 52. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar;
 53. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar;
 54. pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi, sumberdaya di bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar,
 55. Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar; dan
 56. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Biro Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Kepala Biro dengan rincian tugas:

1. merumuskan program kerja di lingkungan Biro Kesejahteraan Rakyat;
2. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Biro Kesejahteraan Rakyat;
3. membina bawahan di lingkungan Biro Kesejahteraan Rakyat;
4. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Biro Kesejahteraan Rakyat;
5. menelaah konsep dan merumuskan kebijakan Bagian Bina Mental Spiritual;
6. menelaah konsep dan merumuskan kebijakan Bagian Kesejahteraan Rakyat Non

Pelayanan Dasar;

7. menelaah konsep dan merumuskan kebijakan Bagian Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar;
8. melaksanakan pemantauan dan pembinaan tugas Biro Kesejahteraan Rakyat;
9. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Biro Kesejahteraan Rakyat;
10. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Biro Kesejahteraan Rakyat; dan
11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis

Biro Kesejahteraan Rakyat membawahi:

1. Sub Bagian Tata Usaha Biro

Sub Bagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi umum, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, pengembangan SDM, rumah tangga perlengkapan, dan penyiapan bahan perencanaan dan evaluasi. Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha Biro Kesejahteraan Rakyat adalah:

- a. penyiapan bahan dan pengoordinasian perencanaan program kegiatan dan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang biro;
- b. penyiapan bahan perencanaan anggaran dan penyusunan dokumen anggaran;
- c. penyiapan bahan Laporan bulanan, triwulan, semester, tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah lingkup perangkat daerah;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- e. pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar, kehumasan, rumah tangga dan aset;
- f. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai;

- g. penyiapan bahan penyusunan analisis kepegawaian;
 - h. pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian;
 - i. pelaksanaan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan;
 - j. pelaksanaan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan;
 - k. pelaksanaan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - l. pelaksanaan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup biro;
 - m. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKJIP, LKPJ, dan LPPD lingkup biro;
 - n. pelaksanaan pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup biro;
 - o. pelaksanaan perencanaan pemeliharaan perlengkapan biro;
 - p. pelaksanaan perencanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
 - q. pelaksanaan pembinaan Pegawai ASN;
 - r. penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan, informasi faktor jabatan dan standar kompetensi jabatan terhadap seluruh jabatan;
 - s. penyusunan job description seluruh jabatan dilingkungan unit organisasi;
 - t. penyusunan dan menilai Tingkat Kematangan Perangkat Daerah;
 - u. penyusunan dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah; dan
 - v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.
2. Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Permasalahan Utama

Dalam rangka mewujudkan visi **"Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim"**, Biro Kesejahteraan Rakyat Sekertariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau mengemban misi "Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya, demokratis, berkeadilan, tertib, rukun dan aman di bawah payung budaya Melayu. Adapun permasalahan utama yang harus diselesaikan dalam pencapaian misi tersebut secara singkat dapat dirinci sebagai berikut:

1. Bagaimana edukasi peningkatan pemahaman nilai-nilai keagamaan kepada masyarakat Provinsi Kepulauan Riau melalui upaya-upaya pembinaan, Fasilitasi, koordinasi dan kerjasama secara menyeluruh dengan tokoh agama dan lembaga keagamaan;
2. Upaya koordinasi peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau dengan instansi terkait;
3. Peningkatan pelayanan administrasi dan pembinaan sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, untuk Pendukung visi dan misi Gubernur Kepulauan Riau.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Gambaran Umum Organisasi
- B. Tugas dan Fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat
- C. Permasalahan Utama
- D. Sistematika Penulisan



BAB II : PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026
- B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT TAHUN 2023

- A. Capaian Kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Tahun 2024
- B. Realisasi Anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat Tahun 2024

BAB IV : PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka untuk mewujudkan percepatan pembangunan daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan pemberdayaan peran serta masyarakat dan pelaksanaan pembangunan di semua bidang, maka perlu dilakukan pengendalian agar pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan dengan tepat waktu, tepat mutu, tertib administrasi, tepat sasaran dan tepat manfaat.

Biro Kesejahteraan Rakyat yang berada dibawah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau bertanggung jawab dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar.

Berbagai kegiatan telah dilaksanakan guna mendorong tercapainya sasaran-sasaran yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2024. Rencana kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat pada tahun 2024 dituangkan ke dalam 2 (dua) program yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Provinsi
2. Program Kesejahteraan Rakyat

Kemudian dijabarkan ke dalam 9 (sembilan) kegiatan dan 17 (tujuh belas) sub kegiatan yang didukung oleh APBD (Perubahan) Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 157.255.836.765,- (seratus lima puluh tujuh miliar dua ratus lima puluh lima juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah).

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi

Kepulauan Riau berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada:

1. Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026;
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024;

A. Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 merupakan implementasi dan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan di Sekretariat Daerah Kepulauan Riau. Rencana Strategis ini berfungsi sebagai dokumen perencanaan taktis strategis yang disusun sesuai dengan kebutuhan dengan mengacu pada RPJMD Pemerintah Kepulauan Riau.

Pada tahun 2023 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan evaluasi terhadap RPJMD Tahun 2021-2026. Evaluasi sendiri dilakukan karena adanya perubahan terhadap indikator kinerja utama daerah, perubahan kebijakan nasional dan perubahan komposisi perangkat daerah baik dari sisi jumlah perangkat daerah maupun unit kerja yang ada dalam perangkat daerah.

Perubahan Renstra Setda antara lain didalamnya karena terdapat perubahan mendasar terkait jumlah dan nomenklatur penamaan Biro yang merupakan unit kerja perangkat daerah, termasuk perubahan tugas dan fungsi serta struktur organisasi dan jabatan yang sudah ada sebelumnya dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Perubahan Renstra Setda tahun 2021-2026 disusun untuk menjabarkan perubahan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang memuat tugas pokok dan fungsi yang baru, gambaran kondisi capaian kinerja dan hasil kinerja yang ingin dicapai serta program, kegiatan dan sub kegiatan pokok yang bersifat indikatif

Maksud dari penyusunan Perubahan Renstra ini adalah sebagai penjabaran Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026, khususnya pada fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat, yang memuat tugas pokok dan fungsi organisasi, gambaran kondisi capaian kinerja dan hasil kinerja yang ingin dicapai serta program, kegiatan dan sub kegiatan pokok yang bersifat indikatif..

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Renstra ini adalah:

1. Mengetahui hasil pelaksanaan dan evaluasi kinerja Sekretariat Daerah pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 mengacu pada perodesasi Renstra Tahun 2021-2026;
2. Memberikan arah dan panduan dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pembangunan tahunan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah;
3. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah termasuk melaksanakan kebijakan berdasarkan tema pembangunan pertahun pada Perubahan RPJMD;
4. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD tahun 2021-2026;
5. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan/Perjanjian Kinerja di lingkungan Sekretariat Daerah; dan
6. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.



Dalam Renstra dijabarkan potret dan rencana pembangunan yang memuat kondisi, masalah, penentu keberhasilan dan indikasi program kegiatan yang akan dijalankan selama lima tahun ke depan dan dijalankan dalam rencana kerja tahunan mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.

Dalam mewujudkan dan mendukung visi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 yaitu “Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya”, Biro Kesejahteraan Rakyat dalam menjalankan tugas dan fungsi lebih pada pelaksanaan misi ke dua yaitu “Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan”

Adapun tujuan jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam mencapai misi diatas adalah sebagai berikut:

- Tujuan : Terwujudnya Peningkatan Kualitas Kebijakan Daerah dan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah
- Indikator Tujuan : Indeks Reformasi Birokrasi
- Sasaran : Meningkatnya efektivitas tata kelola di bidang kesejahteraan rakyat
- Indikator Sasaran : Persentase Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti

Target kinerja sasaran indikator yang disusun berdasarkan tahun kinerja (2021-2026) dibuat berdasarkan tujuan yang akan dicapai, secara rinci dijabarkan melalui tabel berikut:

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Biro Kesejahteraan Rakyat

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026



Terwujudnya Peningkatan Kualitas Kebijakan Daerah dan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya efektivitas tata kelola di bidang kesejahteraan rakyat	Persentase Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	n/a	n/a	20%	40%	60%	80%	100%
---	----------------------------	---	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

Formula yang digunakan untuk mencapai indikator sasaran adalah Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang dihasilkan dibagi dengan Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang direncanakan dalam 5 (lima) tahun dikali 100.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam PERMENPAN No. 53 Tahun 2014, Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari

kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dengan demikian tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Tahun 2024 diwujudkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dengan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

1. Sasaran strategis, Indikator Kinerja dan Target Perjanjian Kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator	Target
Meningkatnya efektivitas tata kelola di bidang kesejahteraan rakyat	Persentase Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang dihasilkan	60%

2. Anggaran Perjanjian Kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ket
-----	----------	---------------	-----



No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ket
Program Penunjang Urusan Pemerintah Provinsi			
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	85.915.320	APBD
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	138.254.000	APBD
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	462.524.973	APBD
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	306.362.600	APBD
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	453.941.279	APBD
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	253.921.000	APBD
Program Kesejahteraan Rakyat			
7	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	139.188.227.438	APBD
8	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	16.219.631.156	APBD
9	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	147.059.000	APBD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT TAHUN 2024

A. Capaian Kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Tahun 2024

Dalam rangka mewujudkan visi " Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya", Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau memiliki tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan pada misi Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan. Dari misi tersebut diimplementasikan kedalam sasaran Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan peningkatan kesejahteraan rakyat. Untuk mewujudkan misi tersebut maka sasaran selanjutnya di laksanakan dalam ukuran rekomendasi kebijakan peningkatan kesejahteraan rakyat yang dihasilkan. Berikut uraiannya:

1. Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembinaan Mental Spiritual Di Provinsi Kepulauan Riau

a. Rekomendasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual

1) Persoalan

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Biro Kesejahteraan Rakyat Pada Tahun 2024 mengalokasikan Belanja Hibah sebesar Rp. 112.515.060.000,00 (seratus dua belas miliar lima ratus lima belas juta enam puluh ribu rupiah) kepada Masjid, Musholla, TPQ, BKMT, Yayasan dan Rumah Ibadah Lainnya dengan realisasi Rp. 102.164.220.000,00 (seratus dua miliar seratus enam puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2022 yang mengatur Tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggung Jawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial SKPD melakukan evaluasi terhadap kelengkapan, keabsahan dan kelayakan usulan hibah sebelum dianggarkan dalam APBD dalam bentuk evaluasi administrasi dan dilakukan peninjauan lapangan.

Dalam hal peninjauan lapangan, untuk penerima hibah maupun calon penerima hibah di luar Kota Tanjungpinang tidak dapat dilakukan secara optimal. Anggaran yang tersedia belum cukup memadai untuk melakukan survey atau peninjauan lapangan ke 7 (tujuh) Kabupaten/kota.

2) Praanggapan

- a) Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Kepulauan Riau sebagai salah satu OPD penyaluran pemberian hibah pada Provinsi Kepulauan Riau dianggap belum maksimal dalam peningkatan dan penguatan dalam penyaluran hibah kepada Masyarakat.
- b) Masing-masing OPD teknis berjalan sendiri-sendiri sesuai dengan anggaran yang tersedia dan sering terjadinya double penerima hibah.
- c) Dukungan perencanaan dan anggaran dari Pemerintah Daerah dianggap belum sesuai dengan yang diinginkan/tidak adanya anggaran

3) Fakta-Fakta yang mempengaruhi

Dalam pelaksanaan pemberian bantuan hibah kepada Masjid, Musholla, TPQ, BKMT, Yayasan dan Rumah Ibadah Lainnya terdapat kendala yang dihadapi antara lain :

- a) Kurang lengkapnya persyaratan kelengkapan dari penerima hibah
- b) Faktor jarak dan transportasi antar Kabupaten/Kota yang memerlukan biaya yang besar.

4) Analisis

- a) Diperlukan memberikan pemahaman kepada Masyarakat tentang mekanisme pemberian bantuan hibah di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
- b) Diperlukan pemahaman dan pemikiran yang sama dan komprehensif terhadap penguatan dan penyaluran bantuan hibah dari semua OPD terkait baik yang ada di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Kab/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau.
- c) Hal ini dilakukan pertemuan secara berkala dari semua OPD terkait yang memberikan penyaluran bantuan hibah kepada Masyarakat.
- d) Ketersediaan anggaran yang signifikan tentunya akan membantu dalam pengembangan dan penguatan penyaluran bantuan hibah yang ada di Kabupaten/Kota se- Provinsi Kepulauan Riau.
- e) Monitoring dan evaluasi terus dilakukan ke Kabupaten/Kota untuk memastikan bantuan hibah yang diberikan sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku.

5) Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka Biro Kesejahteraan Rakyat harus melakukan koordinasi kepada para penerima bantuan hibah bekerja sama dengan perangkat daerah terkait di setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau

6) Saran/Rekomendasi

- a) Perlu adanya anggaran untuk melaksanakan koordinasi di setiap Kabupaten/Kota melalui kegiatan Rapat Koordinasi.
- b) Mengumpulkan para calon penerima bantuan hibah di setiap Kabupaten/Kota pada kegiatan Rapat Koordinasi tersebut.
- c) Melakukan verifikasi persyaratan kelengkapan calon penerima hibah di setiap Kabupaten/Kota

b. Rekomendasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Fasilitas Kelembagaan Spiritual

1) Persoalan

Biro Kesejahteraan Rakyat, berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai tugas dan fungsi yang disusun dengan memperhatikan dan berpedoman pada Dokumen Rencana Strategi (Renstra) Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Sejalan dengan Pembangunan daerah tersebut, maka diharapkan Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau dapat mempertahankan nilai-nilai moralitas Masyarakat melayu, Dimana agama Islam menjadi sumber utama referensinya dengan dasar keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dan bagi Masyarakat selain Islam juga dapat melaksanakan ajaran agamanya sehingga tercipta kerukunan antar umat beragama.

Namun demikian penyusunan dan perencanaan program dan kegiatan bidang keagamaan dan bantuan hibah masih perlu dilakukan pembinaan dan dikembangkan menjadi program strategis, lebih khusus di daerah terpencil dan hinterland (daerah pesisir). Oleh karena itu beberapa persoalan yang masih perlu dibahas dan di evaluasi Biro Kesejahteraan Rakyat antara lain sebagai berikut:

- a) Dokumen perencanaan termasuk Visi dan Misi Gubernur Kepulauan Riau, harus di jadikan pedoman dan referensi untuk penyusunan dan perencanaan program dan kegiatan bidang keagamaan, sehingga tidak menimbulkan persoalan dalam mengukur keberhasilan capaian kinerja melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).
- b) Pembinaan keagamaan dalam kerukunan Hidup antar umat beragama masih secara berkelanjutan tetap dilaksanakan.
- c) Guru Pendidikan keagamaan Non Formal masih perlu dilakukan verifikasi dan validasi data yang akurat sebagai penerima Insentif keagamaan.
- d) Pembinaan yang dilaksanakan Muballigh Hinterland masih perlu di evaluasi dan ditingkatkan secara optimal.
- e) Untuk Memonitor dan Survey usulan permohonan bantuan hibah bagi Masyarakat belum semuanya bisa dilaksanakan, karena adanya keterbatasan biaya perjalanan dinas untuk melakukan pendataan penerima

Hibah, baik Masjid, Gereja, Yayasan dan Lembaga Pendidikan serta Ormas-Ormas Keagamaan lainnya secara optimal.

- f) Tingkat kesadaran Lembaga-Lembaga penerima bantuan Hibah belum secara optimal dilaksanakan. Sehingga dalam pemeriksaan BPK, atau Lembaga penegak hukum lainnya menjadi permasalahan secara hukum dan administratif, laporan pertanggung jawaban bagi para penerima bantuan hibah.
- g) Masih rendahnya kualitas Pendidikan agama, pemahaman dan pengembangan nilai-nilai keagamaan.
- h) Dalam penyusunan dan perencanaan program dan Kegiatan keagamaan masih tambahan alokasi anggaran.

2) Praanggapan

- a) Dalam pelaksanaan pembinaan keagamaan Biro Kesejahteraan Rakyat, sangat mendukung peningkatan kualitas pemahaman keagamaan bagi Masyarakat dalam membangun kerukunan hidup antar umat beragama.
- b) Penyusunan dan perencanaan program dan kegiatan keagamaan dapat dilakukan melalui mekanisme dan prosedur system perencanaan yang baik dan benar.
- c) Pembinaan keagamaan yang dilaksanakan Muballigh Hinterland dapat terlaksana dengan potensi sumber daya, dan bermanfaat bagi Masyarakat yang ada di pulau dan daerah pesisir Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Riau.
- d) Jumlah tenaga Pembina keagamaan perlu di koordinasikan dengan instansi terkait, sehingga potensi sumber daya yang tersedia dapat membawa manfaat yang lebih besar dalam pembinaan dan meningkatkan kualitas umat.
- e) Fasilitasi Pembinaan dan Lembaga keagamaan harus di dukung dengan anggaran yang tersedia, agar pengembangan potensi sumber daya dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam mewujudkan Pembangunan keagamaan di masa yang akan datang.

3) Fakta-Fakta yang mempengaruhi

- a) Melakukan evaluasi dan pengembangan pembinaan terhadap bidang keagamaan (Fasilitasi Bina Mental Spiritual), dengan beberapa stake holders dengan Instansi yang terkait, Kementerian Agama Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Riau.
 - b) Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan kegiatan Insentif Keagamaan.
 - c) Pembinaan dan pengembangan potensi sumber daya dalam manajemen pengelolaan Fasilitasi Bina Mental Spiritual masih perlu dilakukan secara lebih optimal.
 - d) Pelaksanaan kebijakan program dan pemberian Fasilitasi pembinaan dan pengembangan kegiatan keagamaan bagi Tim validasi dan rekapitulasi kegiatan insentif keagamaan, serta peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga yang variative, dinamis dan bahkan lebih kompleks permasalahannya.
- 4) Analisis
- a) Untuk menjaga dan mengendalikan program dan kegiatan Fasilitasi pembinaan mental spiritual, maka diperlukan review secara berkala. Perlu juga adanya suatu Tim internal dan eksternal untuk melakukan evaluasi, apakah dengan sistem evaluasi yang dilaksanakan masih relevan, sesuai dengan tuntutan dinamika perkembangan zaman atau tidak.
 - b) Biro Kesra sebagai salah satu Biro yang berada dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau agar program strategis dibidang keagamaan, selaras dengan dinamika perubahan dan perkembangan pembangunan mental spiritual bagi kehidupan umat beragama.
 - c) Dalam penyusunan program dan kegiatan masih terdapat berbagai kekurangan dan diakui sebagai kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena di sadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di hari esok.
 - d) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan, sikap mental pegawai yang memiliki komitmen dan integritas dengan kesadaran

yang tinggi harus siap melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal.

5) Kesimpulan

Program dan kegiatan Fasilitasi Bina Mental Spiritual menjadi bagian penting dalam penyusunan dan perencanaan program Provinsi Kepulauan Riau. Oleh karena itu, kegiatan ini menjadi factor pendukung utama yang menjadi program strategis Gubernur kepulauan Riau, dalam membangun peningkatan kualitas umat, dan kerukunan umat beragama, yang di sejalkan dengan Pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau.

6) Saran/Rekomendasi

- a) Pelaksanaan kegiatan ini masih perlu tetap mendapatkan dukungan alokasi anggaran untuk pengembangan program strategis Gubernur Kepulauan Riau. Dalam membina dan mengembangkan potensi sumber daya umat.
- b) Program di bidang keagamaan ini dalam capaian target dan sasarannya dapat dikatakan berhasil, seperti penyerahan secara simbolis kegiatan keagamaan oleh Gubernur Kepulauan Riau. Oleh karena itu, perlu mendapatkan respon dan dukungan sebagai refleksi dan aktualisasi realisasi anggaran dan kegiatan yang telah dilaksanakan.
- c) Meningkatkan koordinasi dan konsultasi antar OPD dan Instansi terkait dalam sinergi pelaksanaan program dan kegiatan bidang keagamaan (Fasilitasi Bina Mental Spiritual).

2. Rekomendasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan

a. Persoalan

Persoalan di Bidang Pendidikan mencakup berbagai isu yang mempengaruhi hubungan masyarakat seperti Kurangnya Sumber Daya Manusia, Kualitas guru dan tenaga kependidikan, Kurikulum yang tidak relevan, Biaya pendidikan tinggi, Kesenjangan akses Pendidikan.

Untuk itu perlunya adanya peran Pemerintah khususnya Provinsi Kepulauan Riau untuk dapat meningkatkan kualitas guru dan tenaga kependidikan,

mengembangkan kurikulum yang relevan, meningkatkan akses pendidikan, meningkatkan peran dan partisipasi orang tua dan masyarakat.

b. Praanggapan

Asumsi yang sering muncul dalam bidang pendidikan yaitu asumsi tentang peserta didik, guru dan tenaga kependidikan, kurikulum dan pembelajaran, lingkungan dan teknologi serta peran orang tua dan masyarakat, sehingga perlunya mengatasi pra anggapan dengan cara meningkatkan kesadaran dan pemahaman, menghargai keragaman, menganalisa data dan penelitian, mengembangkan kurikulum yang inklusif serta meningkatkan komunikasi antara sekolah, orang tua dan masyarakat.

Pentingnya mengembalikan dunia pendidikan, baik pendidikan formal, non formal dan informal.

c. Fakta-Fakta yang mempengaruhi

Perlunya kerjasama stakeholder yang terkait diantaranya, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi, dinas pendidikan dan DPRD Provinsi Kepulauan Riau dan ketepatan waktu dalam proses memberikan informasi kepada masyarakat Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka pemberian bantuan beasiswa kepada mahasiswa yang sudah diatur kriterianya oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Biro Kesejahteraan Rakyat untuk keberlangsungan sumber daya manusia yang lebih baik dari tahun ke tahun.

d. Analisis

Minat anak anak kepulauan untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi itu masih minim sehingga pemerintah perlu memberikan stimulus salah satunya adalah bantuan beasiswa.

e. Kesimpulan

Perlunya pemerintah membuat kebijakan pendidikan yang komprehensif, peningkatan anggaran pendidikan, kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan.

f. Saran/Rekomendasi

Perluasan cakupan beasiswa untuk mahasiswa kurang mampu, pengembangan program beasiswa, meningkatkan kerjasama dengan organisasi internasional dan pemanfaatan anggaran CSR untuk pendidikan, peningkatan jumlah beasiswa untuk mahasiswa tidak hanya Diploma III dan Sarjana S-1, tetapi untuk mahasiswa S-2 dan S-3 juga.

3. Rekomendasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan

a. Persoalan

- 1) Sekretariat Tim Pembina UKS Kabupaten Kota se-Provinsi Kepulauan Riau belum berjalan dengan maksimal.
- 2) Koordinasi antar OPD terkait teknis bidang Kesehatan/UKS yang ada di Kabupaten/Kota belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan/belum terintegrasi.
- 3) Perencanaan dan penganggaran belum sepenuhnya mendapatkan dukungan yang maksimal dari Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kepulauan Riau.

b. Praanggapan

- 1) Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Kepulauan Riau sebagai sekretariat TP UKS Provinsi Kepulauan Riau dianggap belum maksimal dalam peningkatan dan penguatan perannya sebagai sekretariat.
- 2) Sekretariat TP UKS sesuai dengan SKB 4 Menteri (Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, dan Kementerian Pendidikan) yang berada di bagian Kesra Kabupaten/Kota dianggap tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Masing-masing OPD teknis berjalan sendiri-sendiri sesuai dengan anggaran yang tersedia.
- 4) Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kepulauan Riau dan bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kab/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau cenderung lebih fokus pada bidang keagamaan.
- 5) Dukungan perencanaan dan anggaran dari Pemerintah Daerah dianggap

belum sesuai dengan yang diinginkan/tidak adanya anggaran.

c. Fakta-Fakta yang mempengaruhi

- 1) Keterbatasan anggaran dan SDM dalam melakukan pembinaan monitoring dan evaluasi membuat peran dari Sekretariat TP UKS tidak berjalan secara maksimal
- 2) Sekretariat TP UKS Kab/Kota sebagian besar sudah tidak berjalan sesuai dengan fungsinya bahkan ada yang sudah tidak mempunyai sekretariat.
- 3) SK Tim Pembina UKS Kab/Kota sebagian besar sudah tidak aktif.

d. Analisis

- 1) Diperlukan pemahaman dan pemikiran yang sama dan komprehensif terhadap penguatan sekretariat TP UKS dari semua OPD terkait baik yang ada di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Kab/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau.
- 2) Melakukan koordinasi yang intensif tentang perencanaan penganggaran pada OPD terkait khususnya Barenlitbang/Bappeda, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan.
- 3) Hal ini dilakukan pertemuan secara berkala oleh TP UKS untuk membahas program kerja yang fokus pada pelaksanaan UKS.
- 4) Ketersediaan anggaran yang signifikan tentunya akan membantu dalam pengembangan dan penguatan TP UKS yang ada di Kab/Kota se- Provinsi Kepulauan Riau.

Monitoring dan evaluasi terus dilakukan oleh TP UKS Provinsi Kepulauan Riau terutama Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kepri kepada TP UKS Kab/Kota.

e. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, kami menyimpulkan:

- 1) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Kab/Kota harus bersinergi dan

meningkatkan koordinasi agar pelaksanaan program di bidang Kesehatan khususnya TP UKS dapat berjalan dengan baik.

- 2) Koordinasi monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala dan berkesinambungan.
- 3) Pembahasan secara bersama tentang program kerja TP UKS dapat disusun secara sistematis dan terstruktur.

f. Rekomendasi

- 1) Penguatan kelembagaan TP UKS perlu dilakukan di tingkat provinsi dan Kab/Kota dengan mengaktifkan kembali SK TP UKS dan Sekretariat TP UKS pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kepri dan bagian Kesra Kab/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau.
- 2) Perencanaan penganggaran yang memadai dan signifikan untuk melakukan pembinaan, koordinasi dan evaluasi dalam menunjang program kerja TP UKS baik di Tingkat Provinsi maupun Kab/Kota.
- 3) Mendorong dan berkonsultasi maupun koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kesehatan untuk dapat membuat dasar pelaksanaan sekretariat TP UKS menjadi lebih kuat berupa aturan Pemerintah baik dalam bentuk Undang-Undang maupun Peraturan Presiden.

4. Rekomendasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial

a. Persoalan

Persoalan di Bidang Sosial mencakup berbagai isu yang mempengaruhi hubungan masyarakat seperti :

- 1) Kemiskinan dan ketidaksetaraan
- 2) Diskriminasi dan keadilan sosial
- 3) Kesenjangan digital
- 4) Konflik sosial dan kekerasan

Untuk itu perlunya kolaborasi seluruh OPD yang terkait dalam rangka menyelesaikan problematika yang ada di maka Bagian Kesejahteraan Rakyat

Pelayanan Dasar Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sosial.

Di Provinsi Kepri dari tahun ke tahun mengalami perubahan peningkatan kesejahteraan di bidang sosial, Kota Batam tetap menjadi daerah dengan jumlah penduduk terbanyak di Kepri.

Sementara untuk kabupaten dan kota lainnya di Kepri yaitu Kota Tanjungpinang Kabupaten Lingga. Kabupaten Natuna. Kabupaten Karimun. Kepulauan Anambas dan Kabupaten Bintan dengan jumlah penduduk dibawah kota Batam.

b. Praanggapan

Asumsi yang sering muncul dalam kehidupan di tengah tengah masyarakat yaitu bidang sosial dan ekonomi, kemampuan dan potensi, kemampuan fisik dan mental, khususnya di Provinsi Kepri itu masyarakatnya multi kultur, multi agama dan multi ras, sehingga timbul dampak pada pra anggapan seperti diskriminasi, ketidak adilan, konflik, kesalahpahaman, perasaan dan emosi serta budaya, untuk itu perlunya pengawasan, pembinaan dalam rangka untuk membangun persatuan dan kesatuan khususnya di Provinsi Kepulauan Riau dan umumnya di seluruh Indonesia. Dan Provinsi Kepri sebagai Barometer kerukunan di Indonesia.

c. Fakta-Fakta yang mempengaruhi

Beberapa fakta yang mempengaruhi kehidupan bidang sosial dengan kondisi Provinsi Kepulauan Riau yang berada di posisi strategis segitiga emas Singapura, Malaysia dan Indonesia, maka muncul problema sosial di masyarakat, kebudayaan dan tradisi, agama dan kepercayaan, pendidikan dan pengetahuan, kondisi ekonomi kesejahteraan serta adanya perubahan teknologi, perubahan lingkungan, kebijakan pemerintah dan regulasi serta adanya konflik dan keamanan regional.

d. Analisis

Analisis bidang sosial melibatkan pemahaman mendalam tentang berbagai aspek kehidupan masyarakat, maka langkah langkah dalam menganalisis dengan cara menentukan isu sosial, mengumpulkan data dari berbagai sumber tentang kehidupan sosial, menghubungkan hasil analisis dengan teori dan konsep sosial. Manfaatnya adalah untuk memahami permasalahan sosial, mengidentifikasi faktor pengaruh, mengembangkan strategi solusi, meningkatkan kesadaran sosial dan dapat membangun masyarakat yang lebih baik.

e. Kesimpulan

Maka kesimpulan tentang bidang sosial dapat melakukan interaksi manusia dan hubungan sosial, struktur sosial, norma dan nilai, keseimbangan dan perubahan sosial, kebudayaan, agama dan identitas serta kesenjangan sosial, ekonomi dan politik, dengan memberikan solusi terhadap masyarakat sosial berupa pendidikan dan kesadaran sosial, kebijakan sosial yang adil, pemberdayaan masyarakat, perlindungan lingkungan sehingga menjadi lebih baik.

f. Saran/Rekomendasi

Bidang sosial khususnya di Provinsi Kepulauan Riau, merupakan aspek penting dalam kehidupan masyarakat perlu dilakukan pendekatan holistik yang melibatkan lingkungan sosial, pendidikan, partisipasi, dan pengembangan potensi. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi kepemudaan, dan masyarakat secara keseluruhan menjadi kunci keberhasilan dalam menghasilkan generasi muda yang tangguh, berintegritas, dan berkontribusi positif dalam membangun Provinsi Kepulauan Riau yang lebih baik.

5. Rekomendasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

a. Persoalan

Peningkatan pembinaan pemuda di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) bisa menghadapi beberapa permasalahan yang mempengaruhi efektivitas program dan inisiatif yang ada. Beberapa permasalahan yang mungkin dihadapi termasuk:

1) Akses dan Infrastruktur

Terbatasnya infrastruktur pendidikan dan fasilitas pelatihan yang memadai, terutama di daerah terpencil atau pulau-pulau kecil, dapat menghambat akses pemuda ke program pembinaan dan pelatihan.

2) Sumber Daya Manusia

Keterbatasan tenaga pengajar atau pelatih yang berkualitas dan berpengalaman dapat memengaruhi kualitas pembinaan yang diberikan kepada pemuda.

3) Pendanaan dan Sumber Daya

Kekurangan dana dan sumber daya untuk menyelenggarakan program pelatihan, seminar, dan kegiatan pengembangan diri dapat menghambat pelaksanaan program yang efektif

4) Kesadaran dan Partisipasi

Kurangnya kesadaran di kalangan pemuda tentang pentingnya pembinaan dan pengembangan diri, serta rendahnya tingkat partisipasi dalam program yang ada, bisa menjadi masalah.

5) Koordinasi Antar Lembaga

Kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat dapat mengakibatkan tumpang tindih atau ketidakefektifan dalam pelaksanaan program.

6) Perubahan Sosial dan Ekonomi

Perubahan cepat dalam aspek sosial dan ekonomi, seperti pergeseran pasar kerja atau tantangan ekonomi lokal, dapat mempengaruhi relevansi dan kebutuhan program pembinaan.

7) Keterampilan yang Relevan

Tantangan dalam memastikan bahwa program pembinaan dan pelatihan relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan tren industri terkini.

8) Keterlibatan Keluarga dan Komunitas

Dukungan yang kurang dari keluarga dan komunitas dalam memotivasi dan mendorong pemuda untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembinaan.

9) Masalah Sosial

Masalah sosial seperti penyalahgunaan narkoba, kekerasan dalam rumah tangga, atau kemiskinan bisa mempengaruhi kemampuan pemuda untuk fokus pada pengembangan diri mereka.

b. Praanggapan

Praanggapan atau asumsi awal dalam pembinaan pemuda yang potensial di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) bisa meliputi beberapa hal yang mendasari pemikiran dan pendekatan terhadap pengembangan potensi pemuda. Berikut adalah beberapa praanggapan umum yang mungkin ada:

1) Potensi Pemuda Tinggi

Dirasakan bahwa pemuda di Kepri memiliki potensi yang besar dalam berbagai bidang, baik dalam aspek pendidikan, keterampilan, maupun kepemimpinan. Oleh karena itu, investasi dalam pembinaan dianggap sebagai langkah penting untuk mengoptimalkan potensi ini.

2) Perlunya Pengembangan Keterampilan

Ada anggapan bahwa pemuda membutuhkan pengembangan keterampilan praktis dan soft skills untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan di pasar kerja dan kehidupan sosial. Pembinaan dianggap sebagai sarana untuk memberikan keterampilan yang relevan dan meningkatkan daya saing.

3) Keterbatasan Sumber Daya

Dianggap bahwa terdapat keterbatasan dalam hal fasilitas, dana, dan sumber daya manusia yang dapat mempengaruhi efektivitas program pembinaan. Oleh karena itu, pendekatan yang efisien dan pemanfaatan sumber daya yang ada secara optimal dianggap perlu.

4) Peran Strategis Pemerintah dan Masyarakat

Ada asumsi bahwa pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat memiliki peran strategis dalam pembinaan pemuda. Kolaborasi antara berbagai pihak dianggap krusial untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan efektif dalam pengembangan pemuda.

5) Keterhubungan Program dengan Kebutuhan Lokal

Diharapkan bahwa program pembinaan harus sesuai dengan kebutuhan dan tantangan lokal di Kepri, termasuk potensi ekonomi lokal dan kebutuhan spesifik daerah. Program yang relevan akan lebih efektif dalam memberikan manfaat bagi pemuda.

6) Kesadaran dan Partisipasi

Dianggap bahwa pemuda mungkin belum sepenuhnya menyadari manfaat dari pembinaan atau belum termotivasi untuk berpartisipasi. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran dan motivasi melalui kampanye informasi dan contoh sukses.

7) Dukungan Keluarga dan Komunitas

Ada anggapan bahwa dukungan dari keluarga dan komunitas sangat penting dalam proses pembinaan. Program yang melibatkan keluarga dan komunitas diharapkan dapat menciptakan sistem dukungan yang lebih kuat bagi pemuda.

8) Inovasi dan Teknologi

Dianggap bahwa penggunaan teknologi dan inovasi dalam program pembinaan dapat membantu meningkatkan efektivitas dan jangkauan program. Teknologi dapat digunakan untuk menyediakan pelatihan jarak jauh, akses ke informasi, dan peluang belajar yang lebih luas.

c. Fakta-fakta yang mempengaruhi

Fakta-fakta yang mempengaruhi pembinaan pemuda di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mencakup berbagai aspek sosial, ekonomi, dan budaya yang dapat memengaruhi efektivitas program dan kebijakan. Berikut adalah beberapa fakta yang relevan:

1) Keterbatasan Infrastruktur (Fasilitas Pendidikan dan Pelatihan serta Transportasi)

Banyak daerah di Kepri, terutama di pulau-pulau kecil, masih mengalami keterbatasan dalam hal fasilitas pendidikan dan pelatihan. Ketersediaan sarana seperti ruang kelas, peralatan, dan teknologi modern sering kali terbatas. akses ke fasilitas pendidikan dan pelatihan bisa sulit karena keterbatasan transportasi antar pulau, yang dapat menghambat pemuda dari daerah terpencil untuk mengikuti program pembinaan.

2) Kondisi Ekonomi (Tingkat Pengangguran)

Pengangguran di kalangan pemuda dapat menjadi masalah, terutama jika keterampilan yang dimiliki tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal. Ini menekankan pentingnya pelatihan yang relevan dengan kebutuhan industri. Ketergantungan pada sektor tertentu, seperti pariwisata atau perikanan, dapat memengaruhi jenis keterampilan yang dibutuhkan dan relevansi pelatihan yang ditawarkan.

3) Kualitas Pendidikan (Kurangnya Kualitas Pengajaran Terhadap Keterampilan yang Diajarkan)

Kualitas pendidikan di beberapa daerah mungkin masih perlu ditingkatkan, termasuk kualitas pengajaran dan kurikulum yang diterapkan di sekolah-sekolah lokal. Adanya kesenjangan antara keterampilan yang diajarkan di sekolah dan keterampilan yang dibutuhkan di pasar kerja dapat menjadi kendala dalam pengembangan pemuda.

4) Demografi dan Distribusi Populasi

Kepri terdiri dari banyak pulau dengan populasi yang tersebar. Ini mempengaruhi penyampaian layanan dan program pembinaan secara merata. Pertumbuhan penduduk yang cepat dapat meningkatkan tekanan pada sistem pendidikan dan pelatihan, serta mempengaruhi kualitas pembinaan.

5) Kebutuhan Sosial dan Budaya

Keberagaman budaya dan sosial di Kepri memerlukan pendekatan pembinaan yang sensitif terhadap nilai-nilai lokal dan adat istiadat. Masalah seperti kemiskinan, kekerasan dalam rumah tangga, dan penyalahgunaan narkoba dapat mempengaruhi kemampuan pemuda untuk fokus pada pengembangan diri.

6) Inovasi dan Teknologi

Tingkat adopsi dan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi mempengaruhi efektivitas program pembinaan, terutama dalam hal pembelajaran jarak jauh dan akses informasi. Keterampilan digital menjadi semakin penting, dan perlu ada upaya untuk memastikan pemuda mendapatkan akses dan pelatihan yang memadai dalam hal teknologi.

7) Partisipasi dan Dukungan Masyarakat

Dukungan dari keluarga dan komunitas berperan penting dalam motivasi dan partisipasi pemuda dalam program pembinaan. Kerja sama antara pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan sektor swasta sangat penting untuk menciptakan program yang efektif dan berkelanjutan.

8) Kebijakan Pemerintah

Kebijakan dan program pemerintah dalam bidang pendidikan dan pengembangan pemuda sangat mempengaruhi implementasi dan keberhasilan pembinaan. Ketersediaan dana dan dukungan dari pemerintah untuk program-program pemuda dapat menentukan skala dan dampak dari inisiatif pembinaan.

d. Analisis

Analisis pembinaan pemuda potensial di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) melibatkan penilaian terhadap berbagai aspek yang mempengaruhi efektivitas dan dampak dari program pembinaan. Analisis ini dapat mencakup elemen-elemen berikut:

1) Konteks Demografis dan Sosial

Kepri terdiri dari banyak pulau dengan populasi yang tersebar. Ini menciptakan tantangan dalam penyampaian program pembinaan secara merata. Pemuda di daerah terpencil mungkin menghadapi kesulitan akses terhadap program yang tersedia. Permasalahan sosial seperti kemiskinan, penyalahgunaan narkoba, dan kekerasan dalam rumah tangga dapat mempengaruhi kesejahteraan dan fokus pemuda dalam mengikuti program pembinaan.

2) Kondisi Pendidikan dan Keterampilan

Kualitas pendidikan di Kepri bervariasi, dengan beberapa daerah mengalami kekurangan fasilitas dan sumber daya. Pendidikan yang tidak memadai dapat mempengaruhi kesiapan pemuda untuk mengikuti program pelatihan dan pembinaan. Program pembinaan harus memastikan bahwa keterampilan yang diajarkan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal. Keterampilan yang relevan dengan industri utama di Kepri, seperti pariwisata dan perikanan, perlu diprioritaskan.

3) Infrastruktur dan Aksesibilitas

Keterbatasan infrastruktur, terutama di pulau-pulau kecil, dapat menghambat akses pemuda terhadap fasilitas pendidikan dan pelatihan. Perlu ada upaya untuk memperbaiki atau menyediakan fasilitas yang memadai. Akses transportasi antar pulau seringkali menjadi kendala. Peningkatan transportasi dan konektivitas antar pulau bisa membantu mempermudah pemuda dari daerah terpencil untuk mengikuti program.

4) Pendanaan dan Sumber Daya

Pendanaan untuk program pembinaan seringkali menjadi tantangan. Program yang baik memerlukan dukungan finansial yang konsisten dari pemerintah, sektor swasta, dan donor. Kualitas dan kuantitas tenaga pengajar dan pelatih yang tersedia mempengaruhi efektivitas pembinaan. Keterbatasan dalam hal ini bisa mempengaruhi kualitas program yang diberikan.

5) Kolaborasi dan Dukungan Masyarakat

Pemerintah daerah berperan penting dalam merancang dan melaksanakan kebijakan pembinaan pemuda. Kebijakan yang efektif dan dukungan administratif sangat penting untuk keberhasilan program. Dukungan dari keluarga dan komunitas dapat meningkatkan motivasi pemuda untuk berpartisipasi dalam program pembinaan. Program yang melibatkan komunitas lokal lebih cenderung berhasil.

6) Inovasi dan Teknologi

Teknologi informasi dapat digunakan untuk menyediakan pelatihan jarak jauh, akses ke sumber daya pendidikan, dan memfasilitasi komunikasi antara pemuda dan pelatih. Penerapan teknologi dapat memperluas jangkauan dan meningkatkan efektivitas program pembinaan. Pemuda perlu diberikan pelatihan dalam keterampilan digital untuk mempersiapkan mereka menghadapi tantangan modern di dunia kerja.

7) Evaluasi dan Penyesuaian Program

Evaluasi berkala terhadap program pembinaan sangat penting untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta untuk menyesuaikan program agar lebih efektif. Mendapatkan umpan balik dari peserta program dan stakeholder lainnya dapat membantu dalam memperbaiki dan menyesuaikan program pembinaan agar lebih sesuai dengan kebutuhan pemuda.

8) Tantangan dan Peluang

Keterbatasan infrastruktur, dana, dan sumber daya manusia; permasalahan sosial; serta aksesibilitas dapat menjadi tantangan utama dalam pembinaan pemuda. Keberagaman sumber daya lokal, potensi ekonomi dari sektor-sektor utama seperti pariwisata dan perikanan, serta dukungan teknologi bisa menjadi peluang untuk mengembangkan program pembinaan yang lebih efektif dan relevan.

e. Kesimpulan

Pembinaan pemuda potensial di Kepri memerlukan pendekatan yang terintegrasi dan adaptif. Mengatasi tantangan infrastruktur, sosial, dan ekonomi sambil memanfaatkan peluang yang ada akan membantu dalam merancang program yang efektif dan bermanfaat bagi pemuda di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan memajukan potensi pemuda di Kepri. pendekatan yang menyeluruh, mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi kebutuhan dan potensi pemuda menjadi kunci terhadap upaya menciptakan potensi pemuda di Provinsi Kepulauan Riau

f. Saran

Saran yang dapat kami sampaikan dalam pembinaan pemuda yang potensial di Provinsi Kepulauan Riau antara lain:

- 1) Perlunya kalaborasi antar instansi pemerintah daerah provinsi kepri baik pada level provinsi maupun ditingkat kabupaten kota dalam mengsinergiskan program kerja dan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan potensi pemuda Provinsi Kepulauan Riau
- 2) Menciptakan peraturan daerah yang dapat mendukung berbagai program dan kegiatan pembinaan kepemudaan di Provinsi Kepulauan Riau khususnya pada bidang-bidang kewirausahaan
- 3) Kalaborasi pada berbagai pihak termasuk pihak swasta dalam mengembangkan potensi pemuda di Kepri

6. Rekomendasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

a) Persoalan

Pembangunan pada dasarnya adalah upaya sadar untuk memanfaatkan potensi yang layak memecahkan permasalahan yang

dihadapai serta memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat yang lebih baik. Banyak permasalahan yang timbul di masyarakat Desa maupun di Kota salah satunya dari sisi Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak. Dimana dalam mengatasi permasalahan tersebut belum optimal sehingga diperlukan keterpaduan, keselarasan, dan sinergitas program kegiatan antara sektor dalam rangka meningkatkan kualitas hidup pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Peranan perempuan dalam pembangunan adalah hak dan kewajiban yang dijalankan oleh perempuan pada status atau kedudukan tertentu dalam pembangunan, baik pembangunan di bidang politik, ekonomi, sosial budaya maupun pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan, baik di dalam keluarga maupun di dalam masyarakat. Oleh karena itu, perlu diupayakan peranan perempuan dalam pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang berperspektif gender, yang dimaksudkan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender atau kemitrasejajaran yang harmonis antara pria dengan wanita di dalam pembangunan. Dalam rangka mewujudkan kualitas perempuan, kesetaraan dari keadilan gender yang masih sulit untuk dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, maka diperlukan upaya yang lebih besar untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang gender, sehingga berbagai ketimpangan sebagai akibat dari masalah struktural dan nilai-nilai budaya yang telah lama ada dan berkembang dalam masyarakat dapat dikurangi. Dan pada gilirannya pemberdayaan perempuan menjadi elemen penting dari pelaksanaan pembangunan berkelanjutan

b) Praanggapan

Pemberdayaan perempuan di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi daerah tersebut. Seperti halnya di banyak provinsi lain di Indonesia, pemberdayaan perempuan di Kepri berfokus pada peningkatan akses dan kesempatan bagi perempuan untuk berpartisipasi lebih aktif dalam berbagai sektor, baik dalam bidang pendidikan, ekonomi, politik, maupun sosial.

Berikut adalah beberapa anggapan atau pandangan terkait pemberdayaan perempuan di Provinsi Kepulauan Riau

- 1) Peningkatan Akses Pendidikan: Salah satu langkah pemberdayaan perempuan di Kepri adalah peningkatan akses pendidikan bagi perempuan dan anak perempuan. Di daerah ini, sejumlah program telah diluncurkan untuk mengurangi angka putus sekolah, terutama di daerah-daerah pedesaan dan pulau-pulau terpencil. Pemerintah provii dan kabupaten/kota berupaya memberikan beasiswa dan fasilitas pendidikan untuk memastikan perempuan memiliki kesempatan yang setara untuk mengejar pendidikan.
- 2) Ekonomi Mandiri dan Kewirausahaan: Banyak perempuan di Kepri yang terlibat dalam sektor ekonomi informal, seperti usaha kecil dan menengah (UKM). Pemberdayaan perempuan melalui pelatihan kewirausahaan dan akses modal untuk usaha menjadi fokus penting, agar perempuan dapat lebih mandiri secara finansial. Program pelatihan keahlian, seperti menjahit, kerajinan tangan, dan kuliner, juga banyak dikembangkan untuk membuka peluang usaha.
- 3) Kesehatan dan Kesenjangan Gender: Pemberdayaan perempuan juga terkait dengan peningkatan kesehatan perempuan. Di Kepri, akses kesehatan, terutama di pulau-pulau kecil, menjadi perhatian serius. Program-program yang mendukung kesehatan reproduksi dan mental perempuan telah banyak dilaksanakan. Selain itu, kesetaraan gender juga diupayakan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pekerjaan, keluarga, dan hak-hak perempuan.
- 4) Peran dalam Politik dan Pengambilan Keputusan: Perempuan di Kepri mulai semakin terlibat dalam dunia politik dan pengambilan keputusan. Meskipun masih terdapat tantangan dalam mencapai representasi politik yang setara, beberapa perempuan di Kepri telah terpilih dalam jabatan-jabatan penting, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Hal ini

menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan di bidang politik mulai menunjukkan hasil yang positif.

- 5) Tantangan Pemberdayaan di Wilayah Terpencil: Meskipun ada kemajuan dalam pemberdayaan perempuan di Kepri, tantangan besar tetap ada, terutama di daerah-daerah terpencil dan pulau-pulau kecil. Akses terhadap pendidikan, fasilitas kesehatan, serta peluang ekonomi yang setara sering kali terbatas. Oleh karena itu, upaya pemberdayaan perempuan di daerah ini harus disertai dengan perhatian khusus terhadap infrastruktur dan aksesibilitas.

Secara keseluruhan, pemberdayaan perempuan di Provinsi Kepulauan Riau berjalan dengan baik meskipun masih ada tantangan yang perlu diatasi, terutama dalam memastikan akses yang adil untuk perempuan di daerah terpencil dan dalam meningkatkan kesetaraan di berbagai sektor.

c) Fakta-fakta yang mempengaruhi

Beberapa faktor yang mempengaruhi pemberdayaan perempuan di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) melibatkan berbagai aspek sosial, ekonomi, budaya, dan infrastruktur. Berikut adalah beberapa fakta yang mempengaruhi pemberdayaan perempuan di daerah ini:

1) Geografi dan Aksesibilitas

(a) Tantangan Infrastruktur: Kepri terdiri dari banyak pulau yang tersebar, dan ini menimbulkan tantangan dalam hal aksesibilitas. Banyak daerah di pulau-pulau kecil sulit dijangkau oleh transportasi umum, yang membatasi akses perempuan terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang kerja. Terutama bagi perempuan yang tinggal di daerah terpencil, akses yang terbatas ini menjadi hambatan besar dalam pemberdayaan mereka

(b) Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi: Sebagian besar aktivitas ekonomi dan sosial berpusat di kota-kota besar seperti Batam dan Tanjungpinang, sehingga perempuan yang tinggal di wilayah pesisir

atau pulau-pulau kecil lebih sulit untuk mengakses kesempatan tersebut

2) Tingkat Pendidikan dan Pelatihan

(a) Akses Pendidikan

Meskipun ada upaya untuk meningkatkan akses pendidikan untuk perempuan, di beberapa daerah terpencil di Kepri, angka putus sekolah di kalangan perempuan masih cukup tinggi. Faktor ekonomi keluarga dan budaya lokal kadang-kadang menghalangi perempuan untuk melanjutkan pendidikan mereka. Pemberdayaan perempuan dalam bentuk pendidikan yang lebih tinggi, pelatihan keterampilan, dan keahlian teknis sangat penting untuk meningkatkan potensi mereka dalam dunia kerja.

(b) Program Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan

Berbagai program pemerintah dan lembaga non-pemerintah yang berfokus pada pelatihan keterampilan seperti menjahit, memasak, dan kewirausahaan telah memberikan kesempatan bagi perempuan untuk memperoleh keterampilan yang dapat mendukung mereka dalam menciptakan peluang kerja atau bisnis. Namun, masih ada kebutuhan untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas pelatihan ini.

3) Ekonomi dan Kewirausahaan

(a) Keterbatasan Peluang Ekonomi

Meskipun sektor industri berkembang pesat di Batam, sektor informal yang banyak dijalani oleh perempuan di Kepri, seperti usaha kecil dan menengah (UKM), belum sepenuhnya diberdayakan. Perempuan sering kali menghadapi kendala dalam memperoleh akses modal, informasi, dan jaringan yang diperlukan untuk mengembangkan usaha mereka.

(b) Pemberdayaan Ekonomi Melalui UKM

Pemerintah daerah telah menyediakan pelatihan dan akses permodalan melalui lembaga keuangan mikro dan program pemberdayaan ekonomi. Namun, banyak perempuan masih kesulitan untuk mengakses pembiayaan yang memadai, terutama mereka yang tinggal di daerah yang kurang berkembang.

4) Budaya dan Norma Sosial

(a) Peran Tradisional Gender

Meskipun ada perubahan dalam pandangan terhadap perempuan, beberapa daerah di Kepri masih mempertahankan norma sosial yang cenderung menempatkan perempuan pada peran domestik saja. Budaya patriarkal ini sering membatasi kebebasan perempuan untuk berpartisipasi secara penuh dalam kegiatan ekonomi, politik, dan sosial. Banyak perempuan yang terjebak dalam peran tradisional sebagai ibu rumah tangga, yang berdampak pada kurangnya kemandirian ekonomi.

(b) Pengaruh Agama dan Adat

Kepri, yang sebagian besar penduduknya beragama Islam, juga dipengaruhi oleh nilai-nilai agama dan adat yang mungkin membatasi peran perempuan di ranah publik. Meskipun demikian, di beberapa komunitas ada upaya untuk melibatkan perempuan dalam berbagai kegiatan sosial dan ekonomi dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai tersebut.

5) Kesehatan Reproduksi dan Hak-hak Perempuan

(a) Akses Kesehatan Reproduksi

Masih ada kendala dalam akses layanan kesehatan, terutama di pulau-pulau kecil. Pendidikan tentang kesehatan reproduksi dan hak-hak perempuan dalam bidang kesehatan juga perlu diperluas untuk memastikan perempuan dapat mengakses layanan yang aman dan terjangkau.

(b) Tantangan Kekerasan terhadap Perempuan

Kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan berbasis gender masih menjadi masalah yang dihadapi perempuan di Kepri. Program perlindungan terhadap perempuan dan peningkatan kesadaran tentang hak-hak perempuan perlu terus diperkuat agar perempuan merasa aman dan memiliki keberanian untuk melaporkan kekerasan yang mereka alami.

6) Peran Pemerintah dan Kebijakan

(a) Dukungan Kebijakan Pemberdayaan Perempuan

Pemerintah provinsi Kepri telah mengimplementasikan beberapa kebijakan untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan, seperti program pelatihan keterampilan, pemberian beasiswa untuk perempuan, serta penciptaan ruang untuk keterlibatan perempuan dalam politik dan pemerintahan. Walaupun demikian, implementasi dan pemerataan kebijakan ini masih perlu ditingkatkan, terutama untuk daerah-daerah yang lebih terpencil.

(b) Keterlibatan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan

Meskipun ada peningkatan keterlibatan perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan, representasi perempuan di lembaga-lembaga pemerintahan dan politik di Kepri masih tergolong rendah. Hal ini menunjukkan bahwa ada ketimpangan dalam hal kesempatan bagi perempuan untuk terlibat dalam pengambilan kebijakan.

7) Migrasi dan Tenaga Kerja

(a) Migrasi Pekerja Migran

Banyak perempuan di Kepri yang bekerja sebagai tenaga migran, terutama di sektor domestik dan pelayanan, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Meskipun ini memberikan peluang ekonomi, hal ini juga membawa tantangan terkait perlindungan hak-hak perempuan pekerja migran, termasuk masalah kekerasan, eksploitasi, dan perundungan.

d) Analisis

Pemberdayaan perempuan di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dapat dianalisis dari berbagai aspek, termasuk dalam bidang sosial, ekonomi, pendidikan, budaya, dan kebijakan pemerintah. Berikut adalah analisis terkait pemberdayaan perempuan di Kepri, yang mencakup faktor-faktor penghambat, tantangan, dan peluang untuk kemajuan.

1) Kondisi Sosial dan Budaya

(a) Norma Sosial dan Peran Gender

Di Kepri, seperti di banyak daerah lain di Indonesia, norma sosial dan budaya sering kali menempatkan perempuan dalam peran tradisional, terutama sebagai ibu rumah tangga dan pengurus rumah tangga. Meski ada perubahan dalam pola pikir dan peran perempuan di masyarakat, pandangan patriarkal yang menganggap perempuan sebagai pihak yang lebih lemah atau terbatas dalam ruang publik masih cukup dominan. Hal ini berdampak pada terbatasnya ruang gerak perempuan dalam banyak aspek kehidupan

(b) Keberagaman Budaya

Kepri adalah provinsi yang kaya dengan keberagaman etnis, suku, dan agama, termasuk Melayu, Batak, dan Tionghoa. Keberagaman ini mempengaruhi dinamika pemberdayaan perempuan, karena setiap kelompok memiliki pandangan yang berbeda terhadap peran perempuan. Beberapa kelompok lebih terbuka terhadap peran perempuan di luar rumah, sementara yang lain lebih konservatif. Hal ini menciptakan ketimpangan dalam implementasi pemberdayaan perempuan yang setara.

2) Pendidikan dan Akses Terhadap Pelatihan

(a) Akses Pendidikan

Tingkat pendidikan perempuan di Kepri telah mengalami peningkatan, namun masih terdapat ketimpangan antara perempuan yang tinggal di daerah perkotaan seperti Batam dan Tanjungpinang dengan mereka yang tinggal di pulau-pulau terpencil. Di daerah pedesaan dan

pulau-pulau kecil, banyak perempuan yang tidak melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi karena faktor ekonomi, kurangnya fasilitas pendidikan, atau anggapan bahwa perempuan hanya perlu berperan sebagai ibu rumah tangga.

(b) Program Pelatihan dan Keterampilan

Berbagai program pelatihan keterampilan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan organisasi non-pemerintah bertujuan untuk meningkatkan keterampilan perempuan dalam berbagai bidang seperti kerajinan, memasak, menjahit, serta kewirausahaan. Meskipun demikian, masih ada kebutuhan untuk memperluas akses program pelatihan di daerah terpencil, serta meningkatkan kualitas program agar perempuan dapat mengembangkan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar.

3) Ekonomi dan Kewirausahaan

(a) Keterbatasan Akses Modal

Salah satu hambatan utama dalam pemberdayaan perempuan di Kepri adalah keterbatasan akses terhadap modal dan fasilitas pendukung untuk menjalankan usaha. Banyak perempuan yang berusaha mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM), tetapi mereka sering kali kesulitan mendapatkan pinjaman atau modal yang cukup, terutama di daerah-daerah terpencil. Perempuan di Kepri juga kurang memiliki jaringan yang kuat untuk memasarkan produk mereka, yang membatasi kemampuan mereka untuk berkembang.

(b) Potensi Sektor Ekonomi Kreatif

Sektor ekonomi kreatif memiliki potensi besar di Kepri, terutama di kota-kota seperti Batam yang merupakan pusat industri dan perdagangan. Pemerintah daerah telah memberikan perhatian terhadap pengembangan UKM dan wirausaha perempuan melalui berbagai program pelatihan dan akses pasar. Namun, untuk

meningkatkan dampaknya, dibutuhkan lebih banyak dukungan dalam bentuk kemudahan akses pembiayaan, pemasaran, dan peralatan.

4) Kesehatan dan Perlindungan Sosial

(a) Akses Kesehatan Reproduksi

Meskipun ada upaya untuk meningkatkan layanan kesehatan di Kepri, tantangan terbesar adalah memastikan akses kesehatan yang memadai, terutama di pulau-pulau kecil dan daerah terpencil. Perempuan di daerah ini sering kali kesulitan mendapatkan layanan kesehatan reproduksi yang berkualitas. Program kesehatan ibu dan anak juga masih perlu diperkuat agar angka kematian ibu melahirkan dapat ditekan.

(b) Kekerasan terhadap Perempuan

Kekerasan terhadap perempuan, baik di ranah domestik maupun publik, masih menjadi isu serius di Kepri. Meskipun ada lembaga yang menyediakan layanan perlindungan bagi korban kekerasan, banyak perempuan yang belum tahu cara mengakses bantuan atau takut melapor karena stigma sosial. Pemberdayaan perempuan juga harus mencakup pendidikan tentang hak-hak perempuan dan perlindungan hukum agar mereka merasa aman dan memiliki keberanian untuk berbicara.

5) Kebijakan Pemerintah dan Dukungan Institusional

(a) Kebijakan Pemberdayaan Perempuan

Pemerintah Provinsi Kepri telah mengimplementasikan beberapa kebijakan untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan, seperti pelatihan kewirausahaan, penyuluhan kesehatan, dan program pendidikan perempuan. Namun, implementasi kebijakan ini sering kali tidak merata, terutama di daerah-daerah terpencil dan pulau-pulau kecil. Pemberdayaan perempuan di sektor publik dan politik juga masih terbatas, meskipun ada peningkatan jumlah perempuan yang terlibat dalam pemerintahan dan organisasi masyarakat.

(b) Peran Lembaga Non-Pemerintah

Lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi perempuan sering kali mengambil peran penting dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan di Kepri. Mereka menyediakan pelatihan, akses ke modal, serta melaksanakan kampanye kesetaraan gender. Namun, untuk mencapai dampak yang lebih besar, kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat harus ditingkatkan.

6) Tantangan dan Peluang

(a) Tantangan

- (1) Ketimpangan Antar Daerah: Ada perbedaan yang cukup signifikan dalam hal pemberdayaan perempuan antara daerah perkotaan seperti Batam dan daerah-daerah terpencil seperti pulau-pulau kecil. Ketimpangan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi menjadi tantangan utama dalam pemberdayaan perempuan.
- (2) Keterbatasan Infrastruktur: Banyak daerah terpencil yang masih kekurangan infrastruktur dasar, termasuk transportasi, yang menghambat perempuan untuk mengakses peluang ekonomi dan sosial.

(b) Peluang

- (1) Pemanfaatan Teknologi: Dengan semakin berkembangnya teknologi digital, perempuan di Kepri dapat memanfaatkan platform online untuk menjalankan usaha, belajar, atau memperluas jaringan sosial dan ekonomi mereka. Pelatihan digital dan literasi media untuk perempuan dapat membuka peluang baru di sektor ekonomi kreatif dan kewirausahaan.
- (2) Pengembangan Sektor Pariwisata: Kepri sebagai destinasi pariwisata memiliki potensi besar untuk memberdayakan perempuan melalui sektor pariwisata dan kerajinan lokal. Program-program pelatihan yang berfokus pada keahlian

pariwisata, seperti pemandu wisata, kerajinan tangan, dan kuliner, dapat menjadi jalur pemberdayaan yang efektif.

e) Kesimpulan

Pemberdayaan perempuan di Provinsi Kepulauan Riau dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait, seperti kondisi geografis, budaya, ekonomi, serta kebijakan yang ada. Untuk memajukan pemberdayaan perempuan secara lebih efektif, perlu adanya perhatian lebih dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut, serta upaya untuk memperkuat infrastruktur, pendidikan, dan kesetaraan gender dalam berbagai sektor. Pemberdayaan perempuan di Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi yang besar, namun juga dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti ketimpangan akses di daerah terpencil, norma sosial yang membatasi peran perempuan, serta keterbatasan dalam hal pendidikan dan ekonomi. Untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan, diperlukan kebijakan yang lebih inklusif dan pemerataan program di seluruh wilayah, serta dukungan yang lebih kuat dalam hal pelatihan keterampilan, akses modal, dan perlindungan terhadap perempuan. Pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta perlu bekerja sama lebih erat untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pemberdayaan perempuan secara menyeluruh.

f) Saran

Pembinaan pemberdayaan perempuan di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) perlu difokuskan pada peningkatan akses, keterampilan, serta kesetaraan dalam berbagai aspek kehidupan. Mengingat tantangan yang dihadapi oleh perempuan, terutama di daerah terpencil dan pulau-pulau kecil, berikut adalah beberapa saran untuk memperkuat pemberdayaan perempuan di Kepri:

1) Meningkatkan Akses Pendidikan dan Keterampilan

(a) Penyediaan Fasilitas Pendidikan yang Merata

Pemerintah perlu memastikan bahwa akses pendidikan untuk perempuan di seluruh Kepri, termasuk di pulau-pulau kecil, dapat

dijangkau dengan mudah. Program beasiswa bagi perempuan, serta pembangunan fasilitas pendidikan yang memadai, harus diprioritaskan di daerah terpencil. Selain itu, peningkatan kualitas pendidikan vokasi yang relevan dengan kebutuhan pasar, seperti keterampilan teknis, manajerial, dan kewirausahaan, juga penting.

(b) Pelatihan Keterampilan yang Relevan

Pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) harus memperluas pelatihan keterampilan untuk perempuan, tidak hanya di bidang tradisional seperti menjahit atau memasak, tetapi juga dalam keterampilan digital, desain, dan kewirausahaan. Pelatihan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dapat membantu perempuan untuk mengakses peluang ekonomi baru melalui platform online

2) Peningkatan Akses Ekonomi dan Modal

(a) Meningkatkan Akses Pembiayaan untuk UKM Perempuan

Banyak perempuan di Kepri yang menjalankan usaha kecil dan menengah (UKM), tetapi mereka menghadapi kesulitan dalam mendapatkan akses ke pembiayaan. Oleh karena itu, penting untuk memfasilitasi program kredit mikro, pinjaman dengan bunga rendah, serta menyediakan akses permodalan yang lebih mudah bagi perempuan. Selain itu, lembaga keuangan dapat memberikan pelatihan tentang manajemen keuangan kepada perempuan wirausaha.

(b) Penyuluhan dan Penguatan Jaringan Bisnis

Program yang membantu perempuan membangun jejaring bisnis dan memasarkan produk mereka di pasar lokal, nasional, dan internasional perlu diperluas. Pemerintah dan sektor swasta dapat memfasilitasi pemasaran produk-produk perempuan melalui platform e-commerce atau pameran produk lokal. Dengan mengembangkan

jejaring bisnis yang kuat, perempuan dapat memiliki akses yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi mereka.

3) Peningkatan Kesehatan dan Perlindungan Sosial

(a) Perbaikan Layanan Kesehatan Reproduksi

Perlu ada perhatian lebih pada penyediaan layanan kesehatan reproduksi yang terjangkau dan berkualitas, terutama di daerah terpencil dan pulau-pulau kecil. Penyuluhan tentang kesehatan ibu dan anak, serta pendidikan tentang hak-hak kesehatan reproduksi bagi perempuan, harus terus diperkuat. Pemerintah daerah harus bekerja sama dengan lembaga kesehatan untuk memastikan pemerataan akses layanan kesehatan yang memadai.

(b) Pencegahan dan Perlindungan Terhadap Kekerasan

Program perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan domestik dan kekerasan berbasis gender harus terus diperkuat. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hak-hak perempuan, serta penyediaan layanan konseling dan tempat penampungan bagi korban kekerasan, sangat penting. Selain itu, penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku kekerasan dapat menjadi langkah pencegahan yang efektif.

4) Peningkatan Peran Perempuan dalam Politik dan Pengambilan Keputusan

(a) Promosi Kepemimpinan Perempuan

Meskipun ada peningkatan jumlah perempuan yang terlibat dalam politik dan pemerintahan, representasi perempuan di Kepri masih belum mencapai tingkat yang seimbang. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk mendorong lebih banyak perempuan untuk berpartisipasi dalam politik, baik melalui pendidikan politik maupun pelatihan kepemimpinan. Kebijakan afirmatif yang mendukung partisipasi perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan perlu diperkuat.

(b) Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas

Program pelatihan yang meningkatkan kemampuan perempuan dalam hal kepemimpinan, manajemen, dan keterampilan komunikasi harus lebih banyak diberikan. Ini akan memperkuat kemampuan perempuan untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan di tingkat lokal maupun regional.

5) Peningkatan Infrastruktur dan Aksesibilitas

(a) Pembangunan Infrastruktur di Daerah Terpencil

Pemerintah provinsi perlu memperhatikan pembangunan infrastruktur, seperti transportasi dan komunikasi, di daerah terpencil dan pulau-pulau kecil. Dengan meningkatkan aksesibilitas, perempuan akan lebih mudah mengakses pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi. Penyediaan fasilitas umum yang ramah perempuan, seperti pasar, ruang publik, dan fasilitas pelayanan sosial, juga harus menjadi perhatian utama.

(b) Pemanfaatan Teknologi untuk Meningkatkan Akses

Teknologi digital dapat digunakan untuk menjembatani kesenjangan akses di daerah terpencil. Program pelatihan tentang teknologi dan digitalisasi untuk perempuan akan membantu mereka untuk tetap terhubung dengan peluang ekonomi, pendidikan, dan sosial yang lebih luas. Pemanfaatan aplikasi mobile untuk layanan kesehatan dan pendidikan jarak jauh juga dapat mempermudah perempuan di pulau-pulau kecil untuk mengakses layanan tersebut.

6) Kampanye Kesenjangan Gender dan Pendidikan

(a) Pendidikan Gender dan Kesadaran Masyarakat

Untuk mengubah pola pikir masyarakat, diperlukan kampanye yang mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender, hak-hak perempuan, dan perlunya menghormati peran perempuan dalam berbagai sektor. Ini dapat dilakukan melalui pendidikan formal di sekolah, seminar, serta media massa dan media sosial.

(b) Keterlibatan Lelaki dalam Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan tidak dapat berhasil tanpa keterlibatan aktif laki-laki. Program yang melibatkan laki-laki untuk memahami dan mendukung kesetaraan gender harus digalakkan, termasuk di tingkat keluarga dan masyarakat.

7) Keterlibatan Sektor Swasta dan Masyarakat

(a) Kemitraan dengan Sektor Swasta

Pemerintah perlu menjalin kemitraan dengan sektor swasta untuk menciptakan lebih banyak peluang kerja bagi perempuan. Perusahaan-perusahaan di Kepri dapat berperan dalam menyediakan pelatihan keterampilan, beasiswa, serta peluang magang atau kerja bagi perempuan. Ini akan membantu perempuan untuk mendapatkan pengalaman kerja yang berharga dan meningkatkan kemandirian finansial mereka

(b) Kolaborasi antara Pemerintah dan LSM

Pemerintah dapat bekerja sama dengan LSM yang fokus pada pemberdayaan perempuan untuk menjalankan program-program yang lebih spesifik dan berbasis kebutuhan masyarakat. LSM dapat membantu dalam memberikan pelatihan, pendidikan, dan perlindungan bagi perempuan yang membutuhkan dukungan lebih.

7. Rekomendasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistika, Persandian dan Perhubungan.

a. Persoalan

Kepulauan Riau merupakan provinsi dengan luas wilayah 96% lautan dan 4 % daratan dengan jumlah pulau sebanyak 2.408 pulau besar dan kecil yang tersebar di 7 kabupaten / kota menjadikan Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi kemaritiman yang cukup strategis. Potensi ini diharapkan dapat menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat Kepulauan Riau, karena itu transportasi laut memiliki peran penting dalam mendukung

konektivitas antar wilayah. Selain itu, sektor perhubungan darat dan udara juga menjadi indikator penting mendorong kesejahteraan masyarakat Kepulauan Riau.

Hal tersebut justru menjadi tantangan bagi pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk mensejahterakan seluruh masyarakatnya secara merata sampai pulau-pulau terluar. Karena geografis wilayah Kepulauan Riau sebagian besar adalah lautan dan memiliki banyak pulau sehingga transportasi laut menjadi salah satu andalan masyarakat Kepulauan Riau untuk saling terhubung dalam kegiatan pekerjaan, pendidikan, Kesehatan, dan lainnya. Namun, sayangnya transportasi laut yang paling banyak digunakan masyarakat juga tidak terlepas dari kendala yaitu keterbatasan jumlah armada, biaya operasional yang tinggi, serta sarana dan prasarana pendukung lainnya yang masih terbatas. Selain itu faktor alam juga menjadi salah satu kendala bagi masyarakat untuk tetap terkoneksi antar wilayah yaitu angin dan gelombang laut yang cukup tinggi pada musim-musim tertentu.

Agar masyarakat Kepulauan Riau tetap dapat terhubung diperlukan juga akses teknologi informasi sehingga minimalisir kendala-kendala yang disebabkan oleh faktor cuaca sehingga memudahkan masyarakat yang akan beraktifitas dan mengakses layanan dari pemerintah dan publik.

b. Praanggapan

Dengan adanya peningkatan pada sarana dan prasarana transportasi khususnya transportasi laut yang banyak digunakan masyarakat Kepulauan Riau dan peningkatan akses teknologi informasi di pulau-pulau akan banyak membawa dampak positif seperti peningkatan penghasilan masyarakat karena mudah membawa dan memasarkan hasil pertanian dan Perkebunan. Sehingga ekonomi masyarakat meningkat yang berdampak pada peningkatan kualitas bidang pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, dan bidang lainnya.

c. Fakta-Fakta yang mempengaruhi

- 1) Peningkatan sarana dan prasarana transportasi khususnya transportasi laut sudah mulai di rasakan oleh masyarakat namun masih terdapat wilayah/pulau yang belum memadai baik pelabuhan maupun armada sehingga akses ke pulau belum lancar yang berakibat harga barang-barang kebutuhan lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya;
- 2) Penggunaan transportasi udara masih terbatas pada wilayah tertentu, sedangkan wilayah pulau-pulau kecil belum bisa dijangkau dengan transportasi udara.
- 3) Akses teknologi informasi/ jaringan internet untuk beberapa wilayah masih kurang sehingga masyarakat terkendala dalam mengakses layanan pemerintahan dan publik;

d. Analisis

- 1) Untuk meningkatkan sarana dan prasarana transportasi agar akses antar pulau lebih mudah dan terjangkau perlu adanya penambahan armada dan perbaikan dan penambahan sarana dan sarana;
- 2) Pengadaan sarana dan prasarana transportasi dan teknologi informasi diperlukan perumusan perencanaan yang matang dengan berbagai data dan bahan yang mendukung, untuk itu dibutuhkan koordinasi dan monitoring dengan berbagai pihak;
- 3) Keterbatasan anggaran menjadi salah satu factor pembangunan sarana dan prasarana transportasi dan teknologi informasi harus dilakukan secara bertahap.
- 4) Transportasi udara hanya bisa dijangkau oleh wilayah/pulau yg besar dan biaya yang cukup tinggi, sehingga masyarakat dipulau-pulau kecil masih harus menggunakan transportasi laut dan dengan armada yang terbatas;

- 5) Pada musim-musim tertentu angin dan gelombang laut cukup tinggi sehingga masyarakat harus membatasi aktifitasnya.

e. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, bahwa sektor perhubungan dan komunikasi informatika yang memadai sangat dibutuhkan dan saling berperan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Riau di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, budaya dan bidang lainnya.

f. Saran/Rekomendasi

- 1) Perlu adanya monitoring dan evaluasi terkait kebijakan yang telah ditindaklanjuti baik itu dari aspek transportasi maupun teknologi informatika yang digunakan;
- 2) Tingkatkan koordinasi antar berbagai pihak yang terkait ;
- 3) Perlu adanya penambahan akses jaringan internet di pulau-pulau lainnya sehingga mempermudah masyarakat mengakses pelayanan dari pemerintah dan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan informasi lainnya.

B. Realisasi Kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat dan target pada Renstra 2021-2026

Realisasi kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat jika dibandingkan dengan target pada dokumen Renstra adalah sebagai berikut:



Tabel Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja dan Realisasi Kinerja berdasarkan Renstra 2021-2026

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI KINERJA PADA TAHUN KE-				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya efektivitas tata kelola di bidang kesejahteraan rakyat	Persentase Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang dihasilkan	n/a	n/a	20%	40%	60%	80%	100%	20%	40%	60%	60%	60%

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					CAPAIAN KINERJA PADA TAHUN KE-				
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya efektivitas tata kelola di bidang kesejahteraan rakyat	Persentase Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang dihasilkan	Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang dihasilkan dibagi Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang direncanakan dikali 100	Persen	20	40	60	80	100	100	100	100	60	60



C. Realisasi Anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat Tahun 2024

Program, Kegiatan, Alokasi anggaran dan Realisasi Keuangan serta Fisik Seluruh program dan kegiatan urusan wajib dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Alokasi dana untuk tahun anggaran 2024 yang semula sebesar Rp 170.126.156.791,- mengalami rasionalisasi pengurangan sehingga setelah perubahan menjadi Rp 157,255,836,765,-. Sedangkan realisasi keuangan sebesar Rp 151,880,567,111,- dengan persentase (96,58%) dan realisasi fisik sebesar (100%).

Realisasi Anggaran dan Realisasi Fisik Biro Kesejahteraan Rakyat sampai dengan 31 Desember 2024 dapat dilihat secara rinci pada tabel dibawah ini.



Tabel Realisasi Keuangan Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	156,989,853,765	151,648,994,111	265,983,000	231,573,000	0	0	0	0
SEKRETARIAT DAERAH	156,989,853,765	151,648,994,111	265,983,000	231,573,000	0	0	0	0
Biro Kesejahteraan Rakyat	156,989,853,765	151,648,994,111	265,983,000	231,573,000	0	0	0	0
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1,434,936,171	1,297,838,969	265,983,000	231,573,000	0	0	0	0
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	85,915,319	81,770,820	0	0	0	0	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	72,535,619	70,341,120	0	0	0	0	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13,379,700	11,429,700	0	0	0	0	0	0
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	138,254,000	115,727,358	0	0	0	0	0	0
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	65,304,000	65,304,000	0	0	0	0	0	0
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	72,950,000	50,423,358	0	0	0	0	0	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	462,524,972	382,805,000	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60,671,465	59,979,000	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	401,853,507	322,826,000	0	0	0	0	0	0
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	40,379,600	40,379,600	265,983,000	231,573,000	0	0	0	0
Pengadaan Mebel	40,329,600	40,329,600	203,241,000	203,241,000	0	0	0	0
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50,000	50,000	62,742,000	28,332,000	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	453,941,279	446,244,741	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	102,900,000	101,440,000	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	351,041,279	344,804,741	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	253,921,000	230,911,450	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	253,921,000	230,911,450	0	0	0	0	0	0
PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	155,554,917,593	150,351,155,142	0	0	0	0	0	0
Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	139,188,227,437	134,264,874,843	0	0	0	0	0	0
Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	108,654,068,893	104,135,477,238	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	30,534,158,543	30,129,397,605	0	0	0	0	0	0
Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	16,219,631,156	15,965,320,049	0	0	0	0	0	0
Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	16,096,473,256	15,862,530,088	0	0	0	0	0	0
Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	23,007,100	19,993,100	0	0	0	0	0	0
Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	100,150,800	82,796,861	0	0	0	0	0	0
Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	147,059,000	120,960,250	0	0	0	0	0	0
Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	56,629,000	42,176,700	0	0	0	0	0	0
Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,	51,170,000	43,725,100	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Transmigrasi dan Tenaga Kerja								
Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	39,260,000	35,058,450	0	0	0	0	0	0
JUMLAH	156,989,853,765	151,648,994,111	265,983,000	231,573,000	0	0	0	0



Tabel Realisasi Fisik Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

Kode	Urai OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Rekening Belanja	Pagu APBD Murni	Pagu APBD Perubahan	Realisasi		
				Keuangan		Fisik
				Rp.	%	%
1	2	3	4	5	6	7
4.01.2.21.2.20.22.0004	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	170.126.156.791	157,255,836,765	151,880,567,111	96.58	100
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.387.699.486	1,700,919,171	1,529,411,969	89.92	100
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	232.652.800	85,915,320	81,770,820	95.18	100
4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	165.676.300	72,535,620	70,341,120	96.97	100
4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	66.976.500	13,379,700	11,429,700	85.43	100
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	220.277.800	138,254,000	115,727,358	83.71	100
4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	116.513.800	65,304,000	65,304,000	100.00	100
4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	103.764.000	72,950,000	50,423,358	69.12	100
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	833.490.660	462,524,973	382,805,000	82.76	100
4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	97.089.860	60,671,465	59,979,000	98.86	100
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	736.400.800	401,853,508	322,826,000	80.33	100



Kode	Urai OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Rekening Belanja	Pagu APBD Murni	Pagu APBD Perubahan	Realisasi		
				Keuangan		Fisik
				Rp.	%	%
1	2	3	4	5	6	7
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	332.720.400	306,362,600	271,952,600	88.77	100
4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	299.789.880	243,570,600	243,570,600	100.00	100
4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.930.520	62,792,000	28,382,000	45.20	100
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	486.496.691	453,941,279	446,244,741	98.30	100
4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	125.731.350	102,900,000	101,440,000	98.58	100
4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	360.765.341	351,041,279	344,804,741	98.22	100
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	282.061.135	253,921,000	230,911,450	90.94	100
4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	282.061.135	253,921,000	230,911,450	90.94	100
4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	167.738.457.305	155,554,917,594	150,351,155,142	96.65	100
4.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	149.309.840.050	139,188,227,438	134,264,874,843	96.46	100
4.01.04.1.01.0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	115.937.341.469	108,654,068,894	104,135,477,238	95.84	100
4.01.04.1.01.0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	33.372.498.581	30,534,158,544	30,129,397,605	98.67	100



Kode	Urai OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Rekening Belanja	Pagu APBD Murni	Pagu APBD Perubahan	Realisasi		
				Keuangan		Fisik
				Rp.	%	%
1	2	3	4	5	6	7
4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	18.046.852.855	16,219,631,156	15,965,320,049	98.43	100
4.01.04.1.02.0001	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	17.794.176.055	16,096,473,256	15,862,530,088	98.55	100
4.01.04.1.02.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	126.338.400	23,007,100	19,993,100	86.90	100
4.01.04.1.02.0003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	126.338.400	100,150,800	82,796,861	82.67	100
4.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	381.764.400	147,059,000	120,960,250	82.25	100
4.01.04.1.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	127.713.000	56,629,000	42,176,700	74.48	100
4.01.04.1.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	127.713.000	51,170,000	43,725,100	85.45	100
4.01.04.1.03.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	126.338.400	39,260,000	35,058,450	89.30	100
	TOTAL	170.126.156.791	157,255,836,765	151,880,567,111	96.58	100



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pengelolaan SDM Aparatur, dan pelaksanaan kebijakan merupakan alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendukung terwujudnya good governance. Laporan Kinerja juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik tentang keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi dari Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Secara umum pelaksanaan tugas di lingkungan Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dapat dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat pada persentase realisasi yang berada pada nilai 100% untuk realisasi fisik dan 96,58% pada realisasi keuangan TA 2024.

Akhirnya, semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya agar seluruh penyelenggara pemerintahan dapat menjalankan amanat dengan sebaik-baiknya sehingga Visi Kepulauan Riau tahun 2021-2026 “Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya” dapat terwujud.

Tanjungpinang Januari 2025

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau



AIYUB, SE, M.Si

Pembina Utama Muda / IV.c